



**DJKN**

# LAPORAN KINERJA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG BANDA ACEH**

2021

**KANTOR WILAYAH DJKN ACEH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

## PENGANTAR

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat adalah semangat yang diusung dalam tahun 2022. Kilas balik pada awal tahun 2022 diawali dengan berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia yang memiliki dampak serius terhadap kestabilan perekonomian nasional. APBN dengan salah satu fungsinya sebagai instrumen stabilisasi hadir sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dari berbagai guncangan dan ketidakpastian global, menjaga pemulihan akibat dampak pandemi covid-19, serta menjaga kesehatan keuangan negara.

APBN sebagai *shock absorber* ditandai dengan pemulihan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di antara negara G20 dan ASEAN 6. Hingga Kuartal III 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,72%. Selain itu, belanja negara juga meningkat hingga 14,19% *year-on-year* serta defisit berhasil ditekan hingga di bawah 3% dari PDB.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, KPKNL Banda Aceh kembali mencatat seluruh capaian dengan sempurna. Tentunya, semua ini tidak terlepas dari seluruh insan KPKNL Banda Aceh dari Kepala Kantor sampai pelaksana dengan semangat dan dedikasi yang lebih membara dari tahun sebelumnya untuk bekerja keras menyelesaikan Kontrak Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022. Hasil dari komitmen kami, akan dilaporkan dan disusun pada Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Banda Aceh Tahun 2022 ini.

Terucap puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPKNL Banda Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan kepada KPKNL Banda Aceh selama tahun 2022.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai instansi pemerintah perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dilakukan berdasarkan realisasi IKU Kemenkeu-Wide Tahun 2022 yang di-cascade secara langsung maupun tidak langsung dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Banda Aceh. Rata-rata capaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2022 untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 114,67 % dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan total 19 IKU. Secara keseluruhan IKU yang dicapai pada tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan.

Harapannya, LAKIN KPKNL Banda Aceh Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang

diemban KPKNL Banda Aceh serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh, diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya agar mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 08 Februari 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Istina Setya Lestari

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). KPKNL Banda Aceh sebagai ujung tombak pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadikan laporan kinerja sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan organisasi, dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2022 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2022 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2020-2024, di mana terdapat 4 tujuan pokok dalam kerangka pembangunan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 yakni Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif; Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; serta Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Banda Aceh menyusun Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU inilah yang kemudian menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

Sepanjang tahun 2022, KPKNL Banda Aceh telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut:

- a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 105,66% dengan realisasi 71,65% dari target 65%;
- b) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 120% dengan realisasi 194,001% dari target 100%;
- c) Tingkat Penurunan outstanding piutang negara sebesar 120% atau pencapaian 135,73% dari target 100%;
- d) Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) mencapai 379,58% dengan pencapaian nilai 120% dari target 100%;

- e) Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL sebesar 105,93% atau pencapaian 4,82 dari target sebesar 4,55;
- f) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 105,66% dari target 100%;
- g) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) sebesar 111,98% dari target 100%;
- h) Deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 120% dari target 19% tercapai 0,04%;
- i) Persentase penyelesaian BKPN sebesar 100% dari target 100%;
- j) Persentase produktivitas lelang sebesar 120% atau realisasi sebesar 49,03% dari target 36%;
- k) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction 108,70% atau 100% dari target 92%;
- l) Deviasi Data PNBPFungsional DJKN tercapai 120% dengan realisasi 0,05% dari target 10%;
- m) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 105,82% dari target 91 tercapai 96,30%;
- n) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset sebesar 107,16% atau capaian 91,09% dari target 85%;
- o) Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi 120% dari target 100%;
- p) Nilai hasil review pengelolaan kinerja dari target 80 tercapai 93,79 hingga mendapat nilai 117,24%;
- q) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator sebesar 110,51% dengan realisasi sebesar 99,46 dari target 90;
- r) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari target 95,50% terealisasi 97,54%;
- s) Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan sebesar 120% dari target 100%.

Seluruh capaian pencapaian IKU pada tahun 2022 memenuhi target sesuai dengan target, bahkan pada beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan sehingga pencapaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 seluruhnya berstatus hijau, dengan hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,67% dari nilai maksimal 120%.

KPKNL Banda Aceh sebagai kantor yang sedang terus bergerak maju, tidak terlena dengan hasil pencapaian yang telah diraih, malah membuat seluruh pegawai semakin antusias dan bersemangat untuk memberikan kontribusi nyata yang optimal, inovasi yang aplikatif, dan ide-ide terbaik di tahun berikutnya.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi.....	8
C. Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh.....	15
D. Mandat Yang Diberikan kepada KPKNL Banda Aceh.....	15
E. Isu-Isu Strategis (Keunggulan, Tantangan, dan Permasalahan).....	16
F. Sistematika Laporan.....	17
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA.....	19
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2022 dan Perbandingannya.....	22
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja.....	31
3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target.....	38
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan.....	39
6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi.....	40
7. Rencana Aksi.....	41
B. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV.....	45
PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
LAMPIRAN.....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan.....	14
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan.....	14
Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin dan Golongan.....	14
<a href="#">Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional.....</a>	14
<a href="#">Tabel 2. 1 Kontrak Kinerja Nomor 8.1/KN.13/2022.....</a>	20
Tabel 3. 1 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2022.....	26
Tabel 3. 2 Target dan Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2021.....	28
Tabel 3. 3 Capaian KPKNL Banda Aceh dalam Renstra Kanwil DJKN Aceh 2020-2024.....	30
Tabel 3. 4 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2022.....	43
Tabel 3. 5 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2022.....	43
Tabel 3. 6 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2022.....	43
Tabel 3. 7 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.....	44
Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.....	44
Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2022....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh.....	19
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2022, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Banda Aceh dari bulan Januari hingga Desember tahun 2022.

### **B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang mempunyai kewenangan melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Struktur organisasi KPKNL Banda Aceh terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), dan 5 eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum), serta kelompok jabatan fungsional. Ketentuan tersebut merupakan

hal yang baru dikarenakan berdasarkan Perpres 57/2020 terdapat perubahan atas 6 (enam) fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu “Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang”, menjadi 3 (tiga) fungsi utama yaitu “Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang”. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN juga bertekad untuk mentransformasi diri guna mengantisipasi arah strategis Kementerian Keuangan maupun arah strategis pemerintah Indonesia secara global.

## Visi

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada KPKNL Banda Aceh, seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta *Roadmap DJKN to distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, VISI DJKN yaitu:

**“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**

Pada Visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standadisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Adapun Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan dan adaptif, penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara yang berperan penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi”.
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum.
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya

### **Misi**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementeraian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimal) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui MISI sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **Tujuan**

Tujuan merupakan bagian dari misi yang berupa penjabaran misi organisasi dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau diperoleh dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun ke depan. KPKNL yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang juga memiliki tujuan KPKNL Banda Aceh memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan

sebelumnya. Tujuan KPKNL Banda Aceh sesuai dengan Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata Kelola dana nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jualan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **Sasaran**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Sasaran strategis untuk mendukung pencapaian tujuan DJKN yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - d. Komunikasi publik yang efektif

Beranjak dari Sasaran DJKN tersebut sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Banda Aceh dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- A. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
  - a. Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;

- b. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;
  - c. Terwujudnya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- B. Seksi Piutang Negara
- a. Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
  - b. Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan;
  - c. Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.
- C. Seksi Hukum dan Informasi
- a. Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang;
  - b. Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - d. Komunikasi publik yang efektif.
- D. Seksi Kepatuhan Internal
- a. Pelaksanaan SOP Unggulan tepat waktu;
  - b. Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
  - c. Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
  - d. Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
  - e. Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
  - f. Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat.
- E. Subbagian Umum
- a. Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
  - b. Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
  - c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang
- a. Terselenggaranya pelayanan lelang yang modern, bersih, transparan dan akuntabel;
  - b. Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang;
  - c. Tercapainya lelang yang produktif.

- G. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai
  - a. Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib dan berkualitas;
  - b. SDM Penilai yang handal;
  - c. Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;
  - d. Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
  - e. Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

### Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Banda Aceh menyelenggarakan fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa perimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

### Komposisi Pegawai

Untuk menjalankan semua tugasnya, KPKNL Banda Aceh memiliki 32 Pegawai PNS serta didukung oleh 10 Pegawai Non PNS (honorar). Adapun komposisi pegawai PNS pada KPKNL Banda Aceh dapat dipetakan berdasarkan golongan, pendidikan, usia, dan kelompok fungsional.

**Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
	A	B	C	D	
II	1	0	10	5	16
III	4	4	3	4	15
IV	1	0	0	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>32</b>

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA / D1	0	2	1	0	3
D3	0	13	1	0	14
D4/S1	0	1	10	0	11
S2	0	0	3	1	4
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan

USIA	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	14	3	0	17
31-40	0	2	5	0	7
41-50	0	0	4	1	5
Di atas 50	0	0	3	0	3
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	6	1	1	17
Perempuan	0	10	5	0	15
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Fungsional

UNIT KERJA	Juru Sita	Pejabat Lelang	Pemeriksa	Penilai	Jumlah
Seksi Hukum dan Informasi	0	0	0	0	0
Seksi Kepatuhan Internal	0	0	0	0	0
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	0	0	0	0	0
Seksi Piutang Negara	1	0	1	0	2
Subbagian Umum	1	0	1	0	2
Kelompok Jabatan Fungsional	0	2	0	2	4
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

### **C. Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh**

KPKNL Banda Aceh memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 13 kota dan/atau kabupaten, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kota Banda Aceh;
- b. Kota Sabang;
- c. Kab. Aceh Besar;
- d. Kab. Aceh Jaya;
- e. Kab. Pidie;
- f. Kab. Pidie Jaya;
- g. Kab. Aceh Barat;
- h. Kab. Nagan Raya;
- i. Kab. Aceh Barat Daya;
- j. Kab. Aceh Selatan;
- k. Kota Subulussalam;
- l. Kab. Aceh Singkil;
- m. Kab. Simeulue.

### **D. Mandat Yang Diberikan kepada KPKNL Banda Aceh**

KPKNL Banda Aceh sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

- a. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- b. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Membuat usulan atas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- b. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;

- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara;
- f. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- g. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- h. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

#### **E. Isu-Isu Strategis (Keunggulan, Tantangan, dan Permasalahan)**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir DJKN sebagai manajer aset mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa pengembangan organisasi modern pengelola kekayaan negara yang semakin berorientasi pada pelanggan dengan percepatan pelayanan melalui dukungan teknologi informasi yang terus disempurnakan. Sejalan dengan “Cetak Biro Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025”, hal ini menandai komitmen DJKN dalam meningkatkan pengelolaan yang lebih baik seiring tuntutan kekinian dalam era transformasi digital (*digitalisasi*). Digitalisasi merupakan upaya meningkatkan kualitas proses bisnis dalam setiap tahapan manajemen aset dan investasi melalui pembangunan sistem yang andal dan terintegrasi. Pelanggan akan lebih mudah mengajukan permohonan pengelolaan aset dan investasi kepada DJKN sehingga pelayanan dapat dengan cepat ditindaklanjuti.

- a. Sebagai organisasi pembelajar, DJKN terus berupaya mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah dilalui sehingga meningkat ke tahapan tingkat lanjut dari manajemen aset (*asset management maturity*). Untuk mewujudkan hal ini secara lebih sistematis dan terukur, mendesain *roadmap* menjadi suatu konsekuensi logis sebagai arahan mencapai cita-cita kondisi paripurna yang diharapkan (*end state*). Berangkat dari penelitian dan pemikiran atas seluruh keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi saat ini, DJKN mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara tugas dan fungsi ideal dan implementasi riil yang saat ini dilakukan (*current state*). Kondisi paripurna manajer aset yang ingin dicapai terbagi kedalam 3 (tiga) hal yaitu: Kekayaan negara dikelola optimal dan berkelanjutan. Instrumental dalam Keuangan Negara. dan Kontributif dalam perekonomian nasional.
- b. Tahun 2022 banyak prestasi hebat yang diukir oleh KPKNL Banda Aceh, mendapatkan Nilai IKPA

Sempurna (Nilai 100) pada Triwulan I, II, dan III. Meraih juara 3 lomba video *vlog*, dan poster terkait penilaian pada perlombaan Carnival Direktorat Penilaian serta juara 4 dalam perlombaan Irama Lagu Nusantara (IGUANA).

- c. Pada tahun ini juga dilaksanakannya monitoring evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas predikat WBBM dari Menpan RB pada tahun 2014.
- d. KPKNL Banda Aceh juga meraih juara 4 perlombaan Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- e. Pencapaian yang luar biasa dari KPKNL Banda Aceh adalah capaian pokok lelang yang tercapai hingga 379,58% yakni dari target pokok lelang sebesar Rp43.000.000.000 tercapai sebesar Rp163.219.258.338, juga capaian produktivitas lelang mencapai 136,201% dengan target 36% dan realisasi 49,03%. Capaian tahun ini juga digenapkan dengan berhasilnya capaian portofolio aset sebanyak 410 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan target 350 NUP.
- f. Meningkatnya frekuensi lelang berdampak positif dengan peningkatan PNBPN akan tetapi berbanding lurus juga dengan peningkatan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang baik yang non TGR ataupun TGR. Perlu adanya regulasi yang lebih tinggi selain PMK atas aturan Lelang.
- g. Tantangan dalam pengurusan piutang negara seringkali Debitor tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitor tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN).
- h. Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) juga memiliki beberapa tantangan dan permasalahan seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi masih kurang mendukung percepatan proses pengelolaan, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah.

## **F. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2022 ini terdiri atas:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab ini menjelaskan secara umum KPKNL Banda Aceh, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPKNL Banda Aceh.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2022.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
  - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
  - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - c. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2022
2. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pencapaian kinerjanya (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di upload ke aplikasi e-sakip);
7. Rencana Aksi ke depan.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran

Perjanjian Kinerja

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis KPKNL Banda Aceh merupakan wujud amanat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2015 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 dan penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to A Distinguished Asset Manager*). Berdasarkan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 yang telah dirumuskan, untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Banda Aceh. Pada perjanjian kinerja tahun 2022, KPKNL Banda Aceh telah menetapkan peta strategi di tahun 2022 sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh**



Perjanjian / kontrak kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Banda Aceh memiliki perjanjian kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor 8.1/KN.13/2022. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Kontrak Kinerja Nomor 8.1/KN.13/2022**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%

		6b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai perbandingan antara target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2022 yang dilengkapi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017), sebagai referensi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai hambatan dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada tahun 2022.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi, yang disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2022 dan Perbandingannya

Secara ringkas, target dan realisasi capaian keluaran (*output*) KPKNL Banda Aceh pada tahun 2022 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian						
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	Max / TLK
Realisasi	15,117%	49,689%	49,689%	111,283%	111,283%	194,001%	

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian						
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	Max / TLK
Realisasi	71,43%	63,03%	63,03%	55,59%	55,59%	49,03%	

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	100%	100%	

Realisasi	21,26%	44,16%	44,16%	305,76%	305,76%	379,58%	Max / TLK
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	Max /
Realisasi	38,92%	90,04%	90,038%	119,61%	307,32%	135,73%	TLK

K-Wide	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi						
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	-	-	-	4,55	4,55	Max /
Realisasi	-	-	-	-	4,82	4,82	TLK

K-Wide	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target		50%	50%	55%	55%	65%	Max /
Realisasi	-	62,32%	62,32%	73,34%	71,65%	71,65%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	4b-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	20%	20%	60%	100%	100%	Max /
Realisasi	0,27%	15,92%	15,92%	57,82%	105,66%	105,66%	TLK

Note : Target 2021 total sebanyak 909 bidang tanah

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	4c-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Max /
Realisasi	30,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TLK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	Max /
Realisasi	5,17%	50,81%	50,81%	71,66%	111,98%	111,98%	TLK

Note : Target 2021 total sebanyak 518 aset

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	5a-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Min /
Realisasi	0,00%	0,07%	0,07%	0,05%	0,04%	0,04%	TLK

**Note : realisasi 2022 0,04 % dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)**

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max /
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	6b-CP Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/
Realisasi	0,43%	0,51%	0,51%	0,06%	0,05%	0,05%	TLK

**Note : Target 2022 sebesar 12,5% dengan polarisasi Minimize (semakin rendah/mendekati 0,00% artinya capaian semakin baik)**

K-Three	Edukasi yang Efektif						
	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	91	91	-	91	91	Max /
Realisasi	-	96,87	96,87	-	95,72	96,30	AVG

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	85%	85%	Max /
Realisasi	-	70,30%	70,30%	-	91,09%	91,09%	TLK

K-Three	SDM yang Kompeten						
	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	Max /
Realisasi	34,19%	57,24%	57,24%	120,00%	120,00%	120,00%	TLK

K-Three	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>						
	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	-	-	-	80	80	Max /
Realisasi	-	-	-	-	93,79	93,79	TLK

K-Three	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>						
	10b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	90	90	90	90	90	90	Max /
Realisasi	99,38	99,50	99,44	99,44	99,44	99,50	AVG

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal						
	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max /
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99,00%	97,54%	AVG

K-Three	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal						
	11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	2022	Pol/KP
Target	-	-	-	-	100%	100%	Max /
Realisasi	-	-	-	-	120%	120%	TLK

Secara ringkas target dan realisasi capaian keluaran (output) KPKNL Banda Aceh pada tahun 2022 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja berikut:

**Tabel 3. 1 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2022**

Kode	IKU	V/C	Target 2022	Realisasi 2022	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
Stakeholder Perspective (25%)								30,00%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	194,00%	14%	50%	194,001%	120,00%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	36%	49,03%	14%	50%	136,201%	120,00%
Customer Perspective (15%)								16,95%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	379,58%	14%	50%	379,58%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	135,73%	14%	50%	135,73%	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							105,93%
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,55	4,82	21%	100%	105,93%	105,93%
Internal Process Perspective (30%)								33,24%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							106,59%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	71,65%	14%	24%	110,22%	110,22%

4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	P/L	100%	105,66%	19%	33%	105,66%	105,66%
4c-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	P/M	100%	100,00%	14%	24%	100,00%	100,00%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/H	100%	111,98%	11%	19%	111,98%	111,98%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	19%	0,04%	14%	100%	199,79%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%
6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	10%	0,05%	14%	50%	199,50%	120,00%
7	Edukasi yang Efektif							105,82%
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	91	96,30	14%	100%	105,82%	105,82%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	P/M						107,16%
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	P/M	85%	91,09%	14%	100%	107,16%	107,16%
Learning & Growth Perspective (30%)								34,49%
9	SDM yang Kompeten							120,00%
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							113,87%
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	P/M	80	93,79	14%	50%	117,24%	117,24%

10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,46	14%	50%	110,51%	110,51%
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							111,07%
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	95,5%	97,54%	14%	50%	102,14%	102,14%
11b-N	Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>114,67%</b>

Sebagai perbandingan, agar dapat mengukur performa kinerja KPKNL Banda Aceh, kami sajikan capaian KPKNL Banda Aceh pada tahun 2021 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi target pada tahun sebelumnya tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh tantangan global dan evaluasi secara menyeluruh, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan melalui rencana strategis untuk mencapai kesempurnaan pencapaian visi dan misi DJKN khususnya KPKNL Banda Aceh. Adapun Target dan capaian kinerja KPKNL Banda Aceh pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 2 Target dan Capaian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2021**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	70,61%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	127,20%
		1c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	140%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	98,95
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	120,35%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL CP	4,5	4,81
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif	4a- Persentase Bidang tanah CP BMN yang disertifikasi	100%	101,32%
		4b- Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) CP	100%	100%
		4c- Deviasi Ketergunaan hasil CP Penilaian	22%	0,00%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	5a- Persentase Efektivitas CP Penyelesaian BKPN	100%	121,95%
		5b- Persentase Produktivitas CP Lelang	35%	48,84%
		5c- Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction CP	92%	100%
		5d- Deviasi Data PNBPN CP Fungsional DJKN	12,5%	0,50%
6.	Edukasi yang efektif	6a- Tingkat efektivitas edukasi N dan komunikasi	91	94,85
7.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a- Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara CP	85%	85,86%
8	SDM yang Kompeten	8a- Persentase pengembangan N kompetensi pegawai	100%	120%
9	Organisasi yang fit-for-purpose	9a- Nilai Reviu Pengelolaan N Kinerja	75	90,37
		9b- Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator N	80	98,53
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran CP	95,5%	96,61%

Tabel 3. 3 Capaian KPKNL Banda Aceh dalam Renstra Kanwil DJKN Aceh 2020-2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial</b>						
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	55%	57%	60%	65%	70%
			-	70,61%	71,65%	-	-
		Implementasi evaluasi kinerja berupa tanah dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%
			121,50%	100,00%	111,98%	-	-
		Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%
			100,00%	101,32%	105,66%	-	-
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	100%	100%	100%	100%	100%
			108,72%	127,20%	194%	-	-
		Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	100%	100%	100%	100%
			163,46%	121,95%	100%		
<b>2.</b>	<b>Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya</b>						
	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100%	100%	100%	100%	100%
				36,83%	120,35%	379,58%	-
		Persentase produktivitas lelang	32%	34%	34%	34%	34%
				33,96%	48,84%	49,03%	-

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien							
	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	29%	28%	27%	26%
			0,27%	0,00%	0,04%	-	-
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			4,80	4,81	4,82	-	-
	Persentase kualitas anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	
		98,93%	96,61%	97,54%	-	-	
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	70%	75%	75%	80%	80%	
		80,65%	85,86%	91,09%	-	-	

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dari evaluasi kinerja terhadap IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2022 sebagai berikut:

### Sasaran Strategis I: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Dalam Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 IKU terkait Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif dengan rincian:

- a. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang dicapai KPKNL Banda Aceh pada tahun 2022 adalah sebesar Rp27.179.946.609,00 Pencapaian KPKNL Banda Aceh ini patut

diapresiasi mengingat target pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.237.000.000,00 atau capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 127,202% dari target. Secara detail diakui, tidak seluruh target PNBPN Tahun 2021 dapat terpenuhi dengan rincian PNBPN Pengelolaan BMN mencapai Rp14.288.320.993,00 atau 133,32% dari target Rp10.717.000.000,00. Kemudian PNBPN Piutang Negara mencapai Rp43.792.105,00 atau 125,12% dari target Rp35.000.000,00 dan PNBPN Lelang mencapai Rp1.293.631.098,00 atau 87% dari target Rp2.937.000.000,00. Semua pencapaian ini adalah pencapaian terbaik yang bisa diusahakan oleh KPKNL Banda Aceh dalam masa Pemulihan Covid-19.

b. IKU Persentase produktivitas lelang

Dalam pengukuran IKU Persentase produktivitas lelang ini ada 2 komponen yang dilakukan pengukuran yaitu persentase Lelang laku keseluruhan (Jumlah frekuensi lelang laku secara keseluruhan dibagi jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan) dan Persentase lelang laku sukarena nilai  $\leq 500.000$  (Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000 dibagi Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000). IKU ini ditargetken sebesar 36% dalam tahun 2022. Pencapaian IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2022 diperoleh capaian 49,03% atau 136,201% jika dihitung dengan indeks tanpa batas.

**Sasaran Strategis II: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Dari sasaran Strategis Pengelolaan Lelang Yang Optimal ini, diukur dari seberapa besar pendapatan pokok lelang yang berasal dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Dari Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh mengusung IKU Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) untuk tahun 2022 dengan total target adalah Rp43.000.000.000,00. Dan tercapai dengan nilai fantastis yakni sebesar Rp163.219.258.338,00 yakni sebesar 120% atau 379,58% jika dihitung berdasarkan indeks tanpa batas dari nilai target. Rincian capaian tersebut adalah Untuk Pokok Lelang Kelas I yakni Rp143.886.172.338,00 atau 479,62% dari target sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Pokok Lelang Pegadaian Rp19.333.086.000,00 atau 148,71% dari target sebesar Rp13.000.000.000,00.

Selain itu terdapat IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang negara, IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2021, yang bertujuan untuk menurunkan outstanding Piutang Negara secara terukur. Nilai Outstanding BKPN KPKNL Banda Aceh per 31-12-2021 adalah Rp35.529.632.554,50 sehingga target Tingkat Penurunan outstanding piutang negara untuk tahun 2022 adalah Rp150.000.000,00. Pencapaian tahun 2022 adalah sebesar Rp203.599.764 dari Nilai Outsanding BKPN atau pencapaian realisasi target adalah sebesar 135,73%. Pencapaian ini tidak lepas dari usaha keras KPKNL Banda Aceh terutamanya Seksi Piutang Negara dalam pencapaiannya, pencapaian penyelesaian ini didapat dari Pelunasan Piutang Negara, Penarikan Piutang Negara dan PSBDT.

### **Sasaran Strategis III: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan KPKNL Banda Aceh. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra organisasi. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi satu IKU, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, yang merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan. Untuk tahun 2022, Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Banda Aceh adalah sebesar 4,82 dengan nilai maksimal 5 dimana target di awal tahun 2022 adalah sebesar 4,55

### **Sasaran Strategis IV: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal**

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara; 2) penilaian; dan 3) lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating). 3). Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset 5). Aset tertib administrasi, fisik, dan hukum 6). Piutang negara terselesaikan dengan optimal. KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi 4 (empat) IKU yaitu Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, Persentase Bidang tanah BMN yang Disertipikatkan, Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), dan Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).

#### **a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Terhadap target sebesar 65%, KPKNL Banda Aceh berhasil merealisasikan sebanyak 71,65% sehingga indeks nilai capaian sebesar 110,22%.

b. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Setelah pada tahun 2021 KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan target sebanyak 921 atau 101,32% dari target 909 sertipikat. Pada tahun 2022 KPKNL kembali berhasil capaian dengan jumlah yang lebih banyak yakni 2.127 sertipikat dari target 2013 sertipikat atau sebanyak 105,66% dari target 100%.

c. Persentase penyelesaian BKPN

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara dikatakan optimal apabila tahapan pengurusan Piutang Negara telah dilaksanakan dan menghasilkan tertagihnya/ terselesaikannya Piutang Negara. Tahun 2021 seluruhnya memiliki bobot 1 dan KPKNL Banda Aceh mendapat target IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN Tahun 2021 adalah sebesar 41 BKPN. Dan KPKNL Banda Aceh dapat menyelesaikan sebanyak 50 BKPN dengan target diperoleh pencapaian persentase 121,95%. Pada tahun 2022 KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan target 10 BKPN dari target 10 BKPN, sehingga tercapai 100%. Adapun program yang diusung DJKN yakni *Crash Program* sangat membantu Penanggung Hutang yang tidak mempunyai kemampuan usaha/finansial karena terkena dampak pandemi covid-19 untuk menyelesaikan utangnya.

d. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta pelaporan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data dan analisis data menggunakan aplikasi portofolio aset.

Evaluasi Kinerja Aset merupakan salah satu program unggulan DJKN yang harus kita laksanakan. Selain itu, Evaluasi Kinerja Aset merupakan program dengan sistem berkelanjutan, Dengan berlatar belakang permasalahan pengelolaan aset, DJKN melakukan manajemen portofolio aset dan mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pengelolaan BMN secara optimal, DJKN berharap dengan adanya penerapan portofolio aset tahunan, maka akan diperoleh 3 (tiga) manfaat yakni, mengidentifikasi dan mengumumkan K/L yang

menggunakan BMN secara kurang optimal; memaksimalkan penggunaan/pemanfaatan BMN berupa lahan/bidang tanah kosong dan/atau idle; mengidentifikasi tanah dan bangunan pemerintah yang memiliki potensi penggunaan/pemanfaatan alternatif yang lebih baik. IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) ini adalah IKU bagi KPKNL Banda Aceh, dan untuk tahun 2021 KPKNL Banda Aceh memperoleh target IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) sebesar 325 dan tercapai sebanyak 410 sehingga menggapai 111.98%

#### **Sasaran Strategis V: Penilaian yang berkualitas**

Pada sasaran strategis ini, terdapat IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian. Dalam target IKU ini KPKNL Banda Aceh merupakan IKU baru yang dimandatkan kepada Seksi Pelayanan Penilaian sejak tahun 2020. Bagi para Penilai Pemerintah di KPKNL Banda Aceh, tentu ini merupakan hal yang wajar, karena nilai yang dihasilkan dari laporan-laporan yang telah dibuat merupakan gambaran nilai wajar terhadap objek penilaian. Analisa-analisa dan kajian-kajian yang diasumsikan sesuai dengan kondisi pasar/pendapatan/biaya yang ada merupakan faktor yang mendukung tercapainya iku deviasi ketergunaan hasil penilaian ini. Tahun 2022 KPKNL Banda Aceh memperoleh target sebesar 19% dengan realisasi sampai akhir tahun 2021 tercapai 0,04% dengan asumsi 100% nilai yang dihasilkan oleh KPKNL dapat dipergunakan oleh satker. Dengan realisasi semakin mendekati 0%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang disimpulkan oleh para Penilai dan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Banda Aceh merupakan dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

#### **Sasaran Strategis VI: Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Dalam Sasaran Stategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 4 IKU terkait Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif dengan rincian:

a. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Dalam pengukuran IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction ini akan mengukur seberapa besar pelaksanaan lelang yang dilaksanakan dengan e-auction dan dengan e-conventional auction. Tentunya harapan semua pelaksanaan telah dengan menggunakan lelang e-auction. Tahun 2022 KPKNL Banda Aceh berhasil melaksanakan IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction sebesar 100% dari target 92%

b. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bidang Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Bidang PPN adalah 10%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Rata-rata realisasi dari deviasi data PNBP Fungsional DJKN sebesar 0,10%. Sehingga, memperoleh nilai 120%.

### **Sasaran Strategis VII: Edukasi yang Efektif**

Pada sasaran strategis tersebut terdapat IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi. Pengukuran Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi dan edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang dididiki memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Dari target yang telah ditetapkan dengan nilai 91%, realisasi yang diraih sebesar 96,30 sehingga mendapat capaian 105,82%.

### **Sasaran Strategis VIII: Pengawasan dan pengendalian yang efektif**

Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dilakukan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat digunakan sebagai saran/rekomendasi/bahan perbaikan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Dan untuk mengetahui kepatuhan satker dalam menindaklanjuti persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh pengelola barang serta tindak lanjut dari sisa aset objek penilaian kembali BMN. Untuk mencapai sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh mengidentifikasi IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset. IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset ini diukur dengan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang

ditindaklanjuti oleh K/L ditambah Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L dibagi dengan penjumlahan dari Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 dan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022 dengan target 85%. Pencapaian target tahun 2022 adalah  $((44+48)/(47+54))=91,09\%$  atau pencapaian 107,016%

### **Sasaran Strategis IX: SDM yang kompeten**

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Formula IKU ini capaian utama ditambah dengan capaian tambahan. KPKNL Banda Aceh mencapai target maksimalnya yakni 120%.

### **Sasaran Strategis X: Organisasi yang *fit for purpose***

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Pada sasaran strategis ini, IKU yang didapatkan KPKNL ada 2 yakni Nilai hasil review pengelolaan kinerja dan indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

Pada IKU nilai hasil review pengelolaan kinerja diraih nilai sebesar 93, 79 dari target 80, sehingga meraih capaian hingga 110,51%. Selanjutnya, pada indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator, IKU tersebut Menyelenggarakan dan memenuhi penyiapan pelaksanaan FGD Kode etik Pegawai dengan tujuan memperoleh feedback bagi KPKNL untuk melakukan perbaikan. Dari target yang ditetapkan nilai 90 dicapai target hingga 99,46 sehingga meraih capaian sebesar 110,51%.

### **Sasaran Strategis XI: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**

Salah satu pengukuran anggaran berdasarkan output yang dicapai maka salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana/anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sasaran strategis ini IKU yang didapat KPKNL adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, sehingga dapat diukur tingkat daya serap Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal serta optimalisasi penyerapan anggaran. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh pada tahun 2022 adalah

sebesar 97,54% dari target sebesar 95,5%, dengan demikian indeks capaian KPKNL Banda Aceh pada tahun 2022 adalah sebesar 102,14%.

Selain itu, terdapat IKU persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan. Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). IKU ini berhasil dicapai hingga 120% dari target 100%.

### **3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target**

Secara umum, pencapaian IKU pada tahun 2022 di atas seluruhnya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 berstatus hijau, dengan hasil penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,67% dari nilai maksimal 120%. Pencapaian yang sangat luar biasa adalah pencapaian dari seluruh seksi. Penerimaan PNBP Lelang yang mampu mencapai Rp6.651.749.145 dari target sebesar Rp1.500.000.000 patut diacungi jempol, karena dalam masa *recovery* perekonomian atas dampak covid-19 dan penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam, yang dalam implementasinya menjadikan badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syari'ah. Pada tahun 2021 Bank Konvensional harus sudah menutup kantor operasionalnya di banda Aceh dan berubah ke Bank Syariah. Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup menantang dalam rangka penerapan aturan tersebut. Perubahan ini cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Banda Aceh, karena perubahan perbankan konvensional ke bank Syariah akan berpengaruh terhadap landasan hukum untuk permohonan lelang.

Selain keberhasilan pendapatan PNBP Lelang keberhasilan juga dapat diacungi jempol bagi Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Pencapaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan. Pada tahun ini dengan target 2.013 bidang tanah terselesaikan sebanyak 2.127 bidang tanah. Keberhasilan tahun ini juga digenapkan oleh terpenuhinya target Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) tertinggi sepanjang 5 tahun kebelakang. Pada Tahun 2022 mampu mencapai target hingga 379,58% yakni sebanyak Rp163.219.258.388 dari target yang ditentukan. Serta Persentase produktivitas lelang yang juga hanya bisa mencapai 136,201%.

Keberhasilan digenapkan dengan penerimaan PNBP Piutang Negara yang mampu mencapai Rp11.525.551 dari target sebesar Rp10.200.00,00 patut diacungi jempol, karena dalam masa pemulihan atas dampak pandemi covid-19 dimana keadaan tidak menentu dan aktifitas yang dibatasi

serta dengan segala kendala dilapangan. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kemampuan membaca situasi dan keadaan, memang posisi keadaan serba sulit akan tetapi dengan adanya program pemerintah *Crash Program* yakni optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara, KPKNL Banda Aceh bersama penyerah piutang juga memanfaatkan untuk penyelesaian-penyelesaian pengurusan Piutang Negara. KPKNL Banda Aceh juga terus melakukan penggalan potensi kepada penyerah piutang dan mensosialisasikan secara *massive* terkait *Crash Program*.

Seluruh pencapaian tersebut patut disyukuri karena walau ditengah banyaknya halangan, namun target mampu dicapai. Semua ini dikarenakan upaya-upaya maksimal yang terus dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh diantaranya adalah melakukan penggalan potensi lelang untuk jenis lelang yang belum optimal (eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN dan non eksekusi sukarela).

Penilai juga menuntaskan pekerjaannya dengan baik ditandai dengan realisasi IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian yang hanya sebanyak 0,04% dimana, realisasi yang semakin mendekati 0%, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang disimpulkan oleh para Penilai dan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Banda Aceh merupakan dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

#### **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya yang dimaksud bisa berupa Dana maupun Manusia serta Peralatan dan Mesin. Pada tahun 2020 dan 2021 Sumber Daya mengalami efisiensi yang sangat banyak, selain jumlah pegawai yang harus ada di kantor juga dibatasi dan pelayanan diarahkan dengan pelayanan daring, sosialisasi dengan daring serta untuk kegiatan tatap muka hampir bisa dipastikan sangat dikurangi sekali.

Dalam masa pemulihan ini, Sumber Daya Manusia telah berhasil mengembangkan inovasi atas apa yang telah terjadi dan dapat memaksimalkan teknologi yang ada dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan tugas, sehingga Sumber Daya Dana juga mengalami penghematan yang cukup signifikan.

#### **5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan**

Berbagai inovasi dirancang oleh pegawai KPKNL Banda Aceh dalam rangka mempercepat proses bisnis yang ada sehingga menunjang keberhasilan atas pencapaian kinerja, inovasi tersebut yaitu:

- a. ANTUM (Aplikasi Pelayanan Tamu Umum)

Aplikasi sistem antrian elektronik yang memungkinkan pengunjung mendapatkan nomor antrian pelayanan secara online. Aplikasi ini akan memuat data informasi pengunjung yang memuat identitas dan tujuan kedatangan yang dapat dipakai oleh petugas APT untuk memanggil petugas KPKNL Banda Aceh yang berkaitan dengan tujuan pengunjung.

b. **MONIKEN (Monitoring Intergrasi Kekayaan Negara)**

Ide baru ini bermanfaat untuk pemantauan progres pengelolaan kekayaan negara dan juga sebagai pengelompokan data arsip secara online yang dapat menunjukkan data secara realtime sesuai informasi yang diinput, dengan adanya monitoring pengelolaan kekayaan negara ini setiap pegawai ataupun kepala seksi pada seksi pengelolaan kekayaan negara juga dapat mengetahui identitas setiap berkas yang telah selesai dikerjakan, pengelompokan berkas jika suatu saat dibutuhkan kembali, dan beberapa data lainnya seperti update capaian kinerja, pengadministrasian nomor laporan pertanggung jawaban dan beberapa hal lainnya yang tentunya berdampak pada efisiensi kinerja pada seksi pengelolaan kekayaan negara.

c. **Tapak Tuan (Tampilan Teraktual Status Laporan Penugasan dan Keuangan)**

Inovasi bentuk pelayanan administrasi dan keuangan merupakan salah satu simplifikasi proses pembayaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam bentuk digital. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan aktual terkait status administrasi dan proses pembayaran perjalanan dinas sehingga mampu mempercepat proses pembayaran serta penatausahaan yang optimal pada setiap pelaksanaan tugas.

d. **Kedai Lelang UMKM**

Kedai lelang UMKM pada tahun ini dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan lelang yang melibatkan pelaku UMKM dan juga beberapa komunitas UMKM yang ada di Banda Aceh dengan target pasar yakni seluruh masyarakat Indonesia dan Teknik publikasi melalui aplikasi lelang juga sosial media KPKNL Banda Aceh. Kegiatan ini selain meningkatkan IKU produktivitas risalah lelang, pokok lelang, dan PNPB Lelang. Namun hal yang sangat istimewa dari kegiatan ini adalah dapat memperkenalkan kebudayaan dan karya seni Rakyat Aceh pada *platform* lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, memperluas jejaring penjualan kreativitas rakyat Aceh yang telah memiliki ide-ide kreatif, inovatif serta solutif

e. **Crash Program**

Program ini merupakan program keringanan utang untuk meringankan utang para debitur. Program ini menawarkan keringanan seluruh utang bunga, denda, dan ongkos (BDO), ditambah keringanan utang pokok yg persentasenya bervariasi sesuai kondisi.

**6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi**

Pada tahun 2022 terdapat rencana aksi sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi/penggalian potensi dengan unit kerja/penyerah piutang Negara dan debitur
- b. Melakukan Koordinasi Rutin dan pengawasan langsung pada Satuan Kerja
- c. Melakukan koordinasi bersama internal kemenkeu mengenai lelang.go.id.
- d. Melakukan Koordinasi Rutin dan pengawasan pada stakeholder terkait.
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait pengosongan objek lelang sebelum dilaksanakan lelang.
- f. Memberikan Pelayanan Informasi dan Pemantauan Progress Rutin.
- g. Aktif mensosialisasikan kepada para penyerah piutang dan para pegawai/staf di lingkungan kantor.
- h. Melakukan koordinasi rutin dan pemantauan tindaklanjut persetujuan pengelolaan BMN.
- i. Monitoring dan evaluasi peningkatan *hard competency*.
- j. Koordinasi kepada seluruh seksi secara berkala.
- k. Melakukan koordinasi terkait potensi PNBP penilaian dan lelang terhadap barang rampasan *illegal fishing* berupa Kapal 350 GT.

Seluruhnya telah dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2022

## 7. Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan mendukung rencana aksi terdahulu dan menganalisis kembali terhadap tantangan atas capaian yang baru di tahun ini, untuk itu KPKNL Banda Aceh telah menyusun beberapa rencana aksi untuk pencapaian sasaran kinerja, yaitu:

- a. Rencana aksi koordinasi dari awal tahun dengan Kantor Pertanahan dan satker, dalam pencapaian target sertifikasi tahun 2023 sebanyak 4.377 bidang. Diakui koordinasi dengan kantor pertanahan yang telah terjalin selama ini sangat baik dalam mendukung program sertifikasi BMN terbukti dengan pencapaian sertifikasi terbanyak di tahun 2019 dan penyelesaian sertifikasi tercepat di tahun 2020, juga pada tahun 2021 telah menyelesaikan target 909 bidang sebelum triwulan II berakhir sampai menuntaskan pula target pada 2022. Selain itu koordinasi dengan satker sebagai penerima manfaat Sertifikasi BMN juga sangat sangat diperlukan, karena tanpa adanya dukungan dari satker-satker penerima manfaat Sertifikasi maka akan sia-sia semua usaha keras KPKNL dan Kantor Pertanahan.
- b. Rencana aksi koordinasi dan sosialisasi juga akan digencarkan dengan pihak perbankan, diwilayah kerja KPKNL Banda Aceh. Selain itu koordinasi dengan satker-satker dan pihak-pihak lainnya seperti UMKM, pegadaian dan pemerintah daerah di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh terkait lelang-lelang yang berpotensi untuk digali, jenis lelang yang akan dioptimalkan di tahun 2023 adalah eksekusi barang rampasan, non eksekusi wajib BMN/BMD dan non eksekusi sukarela UMKM dan pegadaian.

- c. Selain itu, tentunya juga melanjutkan rencana aksi tahun sebelumnya yang telah dianalisis dengan baik dan disesuaikan terhadap setiap indikator kinerja utama dan yang ada pada KPKNL Banda Aceh.

## **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator dari persentase kualitas pelaksanaan anggaran. KPKNL Banda Aceh dengan sinergi yang solid berkomitmen untuk mencapai target realisasi anggaran sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-5/PB/2021 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Hal ini membuahkan hasil yang gemilang yaitu KPKNL Banda Aceh meraih prestasi dengan nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna 100 pada triwulan I, II, dan III pada tahun 2022 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tipe A I Banda Aceh dan Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Realisasi anggaran KPKNL Banda Aceh dengan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2022 adalah sebesar 102,14% atau capaian 97,54% dari target 95,5%. Optimalisasi penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal ditengah perubahan target yang menjadi proses bisnis utama DJKN, dengan tujuan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Sasaran Strategis. Berbagai penyesuaian Pagu anggaran juga dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh untuk dapat mewujudkan anggaran yang menunjang kinerja organisasi.

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-015.09.2.537827/2022 tanggal 17 Nopember 2021 adalah sebesar Rp1.832.340.000 dengan perubahan rencana penarikan dana dan perubahan pagu anggaran antar rincian output, revisi kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp1.618.054.071 atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 88,31%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 88,31% tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

### **1. Belanja Barang**

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.832.340.000 dengan realisasi sebesar Rp1.618.054.071 atau sebesar 88,31%.

### **2. Belanja Pegawai**

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat belanja pegawai dikarenakan sentralisasi pengelolaan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Gaji Pegawai untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 28 Februari 2020. Sehingga, pada tahun 2022 belanja pegawai disentralisasikan ke kantor pusat.

### **3. Belanja Modal**

Belanja modal pada tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan pada pagu anggaran KPKNL Banda Aceh.

**Tabel 3. 4 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2022**

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
<b>A) Nilai IKPA</b>		<b>100,00%</b>
1.	Revisi DIPA	0,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	0,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	25,00%
<b>B) Nilai SMART</b>		<b>0,00%</b>
<b>Capaian Triwulan I</b>		<b>100,00%</b>

**Tabel 3. 5 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2022**

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
<b>A) Nilai IKPA</b>		<b>100,00%</b>
1.	Revisi DIPA	10,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	20,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	25,00%
<b>B) Nilai SMART</b>		<b>0,00%</b>
<b>Capaian Triwulan II</b>		<b>100,00%</b>

**Tabel 3. 6 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2022**

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
<b>A) Nilai IKPA</b>		<b>100,00%</b>
1.	Revisi DIPA	10,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	20,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	25,00%
<b>B) Nilai SMART</b>		<b>0,00%</b>
<b>Capaian Triwulan III</b>		<b>100,00%</b>

**Tabel 3. 7 Laporan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2022**

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
<b>A) Nilai IKPA</b>		<b>99,56%</b>
1.	Revisi DIPA	10,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	19,87%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	9,77%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	25,00%
<b>B) Nilai SMART</b>		<b>96,20%</b>
<b>Capaian Triwulan IV</b>		<b>97,54%</b>

**Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2022**

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	537827   KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH	PAGU REALISASI	0 0,00%	1.832.340.000 1.618.054.071 (88.31%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	1.832.340.000 1.618.054.071 (88.31%)
		SISA	0	214.285.929	0	0	0	0	0	0	0	214.285.929
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU REALISASI	0 (0,00%)	1.832.340.000 1.618.054.071 (88.31%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1.832.340.000 1.618.054.071 (88.31%)
		SISA	0	214.285.929	0	0	0	0	0	0	0	214.285.929

**Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2022**

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4700   Legislasi dan Litigasi	PAGU REALISASI	0 0,00%	10.566.000 6.360.000 (60.19%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	10.566.000 6.360.000 (60.19%)
		SISA	0	4.206.000	0	0	0	0	0	0	0	4.206.000
2	4701   Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU REALISASI	0 0,00%	1.380.080.000 1.251.842.790 (90.71%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	1.380.080.000 1.251.842.790 (90.71%)
		SISA	0	128.237.210	0	0	0	0	0	0	0	128.237.210
3	4702   Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU REALISASI	0 0,00%	8.328.000 4.767.000 (57.24%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	8.328.000 4.767.000 (57.24%)
		SISA	0	3.561.000	0	0	0	0	0	0	0	3.561.000
4	4704   Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	PAGU REALISASI	0 0,00%	6.078.000 4.090.000 (67.29%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	6.078.000 4.090.000 (67.29%)
		SISA	0	1.988.000	0	0	0	0	0	0	0	1.988.000
5	4796   Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU REALISASI	0 0,00%	15.108.000 5.741.664 (38.00%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	15.108.000 5.741.664 (38.00%)
		SISA	0	9.366.336	0	0	0	0	0	0	0	9.366.336
6	4798   Pengelolaan Aset	PAGU REALISASI	0 0,00%	412.180.000 345.252.617 (83.76%)	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	412.180.000 345.252.617 (83.76%)
		SISA	0	66.927.383	0	0	0	0	0	0	0	66.927.383
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU REALISASI	0 (0,00%)	1.832.340.000 1.618.054.071 (88.31%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	1.832.340.000 1.618.054.071 (88.31%)
		SISA	0	214.285.929	0	0	0	0	0	0	0	214.285.929

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2022 dengan sangat baik. Seluruh target atas 11 Sasaran Strategis dengan total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Banda Aceh Tahun 2022 dapat tercapai dengan baik, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 114,67% dari nilai maksimal 120%.

Sebuah prestasi yang harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan terus menerus menuju kesempurnaan. Sementara itu, total capaian serapan anggaran sampai dengan Desember Tahun 2022 adalah Rp1.618.054.071 dari anggaran sebesar Rp Rp1.832.340.000 atau sebesar 88,31%

#### **FAKTOR PENDUKUNG**

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para stakeholder;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu dari seluruh pegawai.

#### **KENDALA**

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Banda Aceh dapat berjalan dengan mudah. Secara global kendala-kendala yang akan dihadapi adalah:

1. Pemberlakuan SKPT online yang pada prakteknya dilapangan masih belum seragam di setiap Kantor Pertanahan;

2. Masih besarnya saldo aset eks BRR dan lokasinya tersebar;
3. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang juga disebabkan oleh banyaknya peraturan/ketentuan yang baru, menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
4. Keterbatasan dukungan anggaran dan SDM yang mengelola BMN ditingkat satuan kerja;
5. Terdapat banyak satuan kerja dan stakeholder yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi;
6. Dampak dari reorganisasi pada DJKN yang menggantikan seksi pelayanan lelang dan pelayanan penilaian menjadi jabatan fungsional terdapat beberapa adaptasi kebutuhan sumber daya manusia pada pelayanan lelang dan penilaian;
7. Terbatasnya Pelelang pada KPKNL Banda Aceh yang menyebabkan pelayanan lelang menjadi kurang maksimal. KPKNL Banda Aceh hanya mempunyai 1 Pelelang Muda dan 1 Pelelang Pertama. Hal yang sama terjadi pada jabatan fungsional Penilai yang hanya terdapat 1 Penilai Pertama dan 1 Penilai Muda;
8. Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) juga memiliki beberapa tantangan dan permasalahan seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi masih kurang mendukung percepatan proses pengelolaan, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah juga penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan;
9. Tantangan dalam pengurusan piutang negara seringkali Debitur tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitur tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN);
10. Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas. Dengan terbatasnya jumlah Pelelang dan Penilai, penetapan jadwal lelang dan penilaian harus benar-benar memerhatikan waktu pelaksanaan, mengingat lama perjalanan dinas luar kota dapat memakan waktu yang panjang.

## **B. Saran**

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Banda Aceh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Banda Aceh agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, diharapkan KPKNL Banda Aceh dapat lebih fokus dalam menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Banda Aceh adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerjasama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan professional kepada stakeholder dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Terus melanjutkan proses penyelesaian pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias;
6. Meningkatkan penggalian potensi lelang, lelang pegadaian dan lelang sukarela;
7. Penambahan jabatan fungsional pelelang dan penilai sehingga pelayanan dapat tersampaikan dengan prima;
8. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi;
9. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
12. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
13. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
14. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Banda Aceh secara berkala;
15. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
16. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
17. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara, serta sertifikasi BMN.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tahun anggaran 2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan informasi secara

transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh. Selanjutnya, LAKIN ini semoga dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan stakeholder serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

## LAMPIRAN



**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 8.1/KN.13/2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG BANDA ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Peta Strategi



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 21 April 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA**  
**ACEH**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
1	Organisasi yang Fit For Purpose	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
2	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80

*Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 21 April 2022*



		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Kegiatan		Anggaran	
<b>Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko</b>		<b>Rp</b>	<b>547.417.000,00</b>
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	17.100.000,00
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	59.896.000,00
3.	Pengelolaan Aset	Rp	470.421.000,00
4.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	-
5.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	-
6.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	-
<b>Dukungan Manajemen</b>		<b>Rp</b>	<b>1.546.077.000,00</b>
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	12.296.000,00
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.514.537.000,00
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	10.916.000,00
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	8.328.000,00
6.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	-

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Syukriah HG

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 21 April 2022



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA  
ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang		25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang		40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara		50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						4,55	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50%	50%	55%	65%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan		40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction		92%	92%	92%	92%	92%	92%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 21 April 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		91	91		91	91	91
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara		40%	40%		40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja						80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator		90	90	90	90	90	90
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran		95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output /Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 21 April 2022



## Sasaran Kerja Pegawai

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**PERIODE PENILAIAN**  
**13 April 2022 s.d. 31 Desember 2022**

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Istina Setya Lestari	NAMA	Syukriah HG
NIP	197512131995031001	NIP	197004191996032001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
2	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
4	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
5	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
6	Persentase Produktivitas Lelang	Persentase Produktivitas Lelang	36%
7	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
8	Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara	Persentase Penurunan Outstanding Penurunan Piutang Negara	100%
9	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,55
10	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
11	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
12	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
13	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
14	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
15	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 21 April 2022



16	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
17	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91
18	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
19	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

**B. KINERJA TAMBAHAN**

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Istina Setya Lestari  
NIP 197512131995031001

Banda Aceh, 13 April 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Syukriah HG  
NIP 197004191996032001

